

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagentan (*Agency Theory*)

Asimetri informasi antara *agent* dengan *principal* sering kali menjadi penyebab adanya praktik manajemen laba di perusahaan, yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto dan Pramuka, 2007).

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemegang saham sebagai pihak *principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah keagentan muncul karena adanya perilaku *oportunistik* dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metoda akuntansi yang dapat

memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*.

Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Namun dalam konteks penelitian ini asimetri informasi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba dapat menyesatkan pengguna informasi keuangan dalam rangka menentukan apakah bank syariah tersebut sehat dan layak untuk beroperasi.

Dengan adanya *agencytheory* diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap penelitian ini untuk dijadikan pertimbangan yang dapat menjelaskan bagaimana bank syariah sebagai *agent* tidak terlepas dari praktik manajemen laba. Bank Syariah berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik oleh para *principal*.

2. Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Bagi hasil sering disebut Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan system dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah islam, seperti diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Istilah "bank syariah" atau "bank bagi hasil" dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian, terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari (Muhamad, 2002).

Bank syariah (Machmud dan Rukmana, 2009) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas kesetaraan dan keadilan. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba), oleh karena itu diperlukan sikap kehati-hatian dalam menjalankan segala kegiatan operasional di perbankan syariah terlebih dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi yang sering di kenal dengan sebutan akuntansi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009), aktifitas perbankan syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh ummat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*alfalah*). Untuk itu transaksi syariah berasaskan prinsip: persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).

Karakteristik akuntansi syariah pada dasarnya sama seperti konsep akuntansi pada umumnya. Prinsip utama yang membedakan keduanya adalah adanya aturan syariah yang harus dipatuhi oleh akuntansi syariah. Perbedaan lain juga dapat dilihat dengan perlakuan entitas, dalam akuntansi konvensional harus ada pemisahan entitas bisnis dengan entitas pemilik tetapi dalam akuntansi syariah entitas didasarkan pada pembagian laba firma, tidak memiliki kewajiban terpisah. Keberlanjutan usaha pada akuntansi konvensional bisnis terus beroperasi sampai bisnis tercapai, sedangkan pada akuntansi syariah kelangsungan usaha tergantung pada kontrak persetujuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil. Perbedaan juga terlihat dari elemen-elemen laporan keuangan, dimana bank syariah memiliki asas dan berbagai macam

transaksi khusus yang tidak ada dalam akuntansi pada umumnya. Seperti pada tabel berikut:

TABEL 2.1
Perbedaan Laporan Keuangan Bank Syariah
dengan Bank Konvensional

Laporan Keuangan Bank Syariah	Laporan Keuangan Bank Konvensional
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	
8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (<i>Qardhul Hasan</i>)	
9. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	

Sumber : PSAK 101, dan PSAK 31,

Dalam KDPPLKS paragraf 68 unsur-unsur laporan keuangan bank syariah terbagi atas:

- a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
- c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan tanggung khusus entitas syariah.

3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan menurut Muhammad (2002) Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Antonio (2001) pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Dalam UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan , tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan tersebut dapat berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna' .
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Penelitian ini fokus hanya pada perataan laba yang dihasilkan dari pengelolaan cadangan PPAP untuk empat jenis pembiayaan utama yang dilakukan bank syariah, yaitu pembiayaan dalam bentuk murabahah, musyarakah dan mudharabah dan istishna. Hal ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Syahfandi (2012), karena keempat jenis pembiayaan tersebut banyak diterapkan di Indonesia.

4. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000).

Sedangkan menurut penelitian Schipper dalam Widowati (2009) manajemen laba adalah intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan pribadi. Definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah intervensi manajemen terhadap laporan keuangan, yang berupa pilihan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kebijakan-kebijakan akuntansi, yang diperkenankan dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk mencapai tujuan/maksud tertentu, sehingga dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Manajemen laba dapat dilakukan melalui beberapa pola. Pola manajemen laba menurut Scott dalam Sulistyawan (2011) dapat dilakukan dengan cara:

a. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang .

b. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga apabila laba tahun yang akan datang turun dapat diambilkan laba pada periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang kerap dilakukan yaitu *income smoothing* (perataan laba). Assih dan Gudono (2000) menyatakan bahwa *income smoothing* adalah cara pengurangan dalam variabilitas laba selama sejumlah periode tertentu atau dalam satu periode, yang mengarah tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan. Hal semacam itu, sebenarnya tidak diperkenankan dalam

ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum, karena prinsip akuntansi mensyaratkan bahwa laba baru dapat diakui apabila ada kepastian laba tersebut dapat terealisasi dan diperoleh (Sulistiyanto, 2008). Adanya *income smoothing* diduga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan, karena dalam upaya ini sebenarnya akan membuat laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sesungguhnya.

Dalam perbankan, konsep *income smoothing* lebih dikenal dengan istilah *dynamic provisioning* yang merupakan penyangga yang digunakan bank dalam mengatasi masa-masa sulitnya dengan menciptakan penyangga pada masa-masa baiknya. Keberadaan hal ini meningkatkan daya tahan perbankan, baik individu maupun secara keseluruhan, meskipun tidak ada jaminan bahwa bank-bank tersebut dapat mengatasi permasalahan kreditnya Pe'rez, *et al.*, dalam Syafandi (2012). Sebenarnya *dynamic provisioning* dapat dijadikan instrumen kebijakan *prudential banking* yang sangat tepat bagi negara-negara berkembang, apalagi jika terdapat ketidakstabilan ekonomi yang tinggi dan besarnya peran perbankan dalam intermediasi keuangan. Syaratnya *dynamic provisioning* harus dikelola secara transparansi, untuk menghindari manajemen laba tersebut.

5. Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan

besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva (Muliati, 2011), log total penjualan (Nuryaman, 2008), kapitalisasi pasar (Halim, dkk., 2005). Machfoedz dalam Mardiyah (2001) menjelaskan bahwa pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 katagori yaitu perusahaan besar (*large firms*), perusahaan sedang (*medium firms*), perusahaan kecil (*small firms*). Penentuan ukuran perusahaan ini adalah bedasarkan kepada total aktiva perusahaan.

6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah suatu cadangan dana yang sengaja dibentuk oleh suatu perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Menurut Suhardjono dalam Syahfandi (2012), risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Pada dasarnya, seluruh kredit memiliki risiko kredit bagi bank. Namun kredit yang memiliki risiko

paling besar adalah kredit yang termasuk golongan *non performing financing* (NPF). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kredit yang termasuk golongan NPF adalah kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI No. 5/9/PBI/2003 sebagai berikut:

- a. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
- b. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - 1) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
 - 2) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - 3) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.

- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- c. Cadangan khusus PPAP untuk piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP.

Penggunaan PPAP telah bergeser dari tujuan awalnya, yaitu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kegiatannya. Perataan laba menggunakan cadangan (PPAP) bertujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cadangan (PPAP) merupakan bagian dari modal tambahan yang termasuk bagian yang penting dan sah dari modal dasar suatu bank. Hingga pada saat apabila menginginkan labanya menjadi lebih tinggi dari laba sesungguhnya, maka perusahaan (bank) dapat menggunakan cadangan tersebut untuk mengatur laba sesuai kepentingannya (Sulistyanto, 2008).

Perataan laba melalui PPAP telah dibuktikan oleh Syahfandi (2012). Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa PPAP dipengaruhi oleh risiko kredit. Risiko kredit merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap PPAP.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Boulila, *et al.*, (2010), Pe'rez *et al.* dalam Syahfandi (2012) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut diproksikan dengan PPAP. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu jumlah pembiayaan dengan proksi *total financing* (TF), Risiko pembiayaan diproksikan dengan *non performing financing* (NPF), dan profitabilitas diproksikan dengan *earning before taxes and provisions* (EBTP).

Hal yang sama dilakukan oleh Syahfandi (2012) yang menggunakan PPAP sebagai variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen yang sama. Syahfandi (2012) menambahkan ukuran perusahaan dipresentasikan dengan variabel Size (log dari *total asset*),kecukupan modal di proksikan dengan *capital adequacy ratio* (CAR) dan umur perusahaan yang dipresentasikan dengan variabel *Age* diukur dalam satuan bulan merupakan variabel kontrol.

Dalam penelitian Boulila, *et al.*, (2010), Pe'rez,*et al.*, dalam Syahfandi (2012), dan Syahfandi (2012) variabel *Total Financing* menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap perataan laba yang diproksikan dengan PPAP. Hasil yang sama dalam penelitian ini yaitu, risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba yang diproksikan PPAP.

Pe'rez, *et al.*, dalam Syahfandi (2012) dan Syahfandi (2012) yang menyatakan profitabilitas yang diproksikan dengan EBTP berpengaruh positif

signifikan terhadap perataan laba yang diprosikan dengan PPAP, ini berbeda dengan Boulila, *et al.*, (2010) yang menyatakan bahwa EBTP bukan merupakan salah satu yang signifikan dalam menentukan jumlah PPAP.

Praktik perataan laba juga dapat dipengaruhi oleh ukuran suatu perusahaan. Moses dalam Muliati (2011)Marrakchi dalam Muliati (2011) , Siddharta (2005), dan Halim, dkk., (2005) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap perataan laba. Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan pada praktik perataan laba yaitu Pandangan pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan perataan laba seperti yang dilakukan oleh Marrakchi dalam Muliati (2011) serta Siddharta (2005). Pandangan kedua yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan praktik manajemen laba seperti yang dilakukan oleh Moses dalam Muliati (2011) dan Halim, dkk., (2005).

C. Penurunan Hipotesis

1. Perataan laba pada Bank syariah

Salah satu penyebab praktik manajemen laba adalah karena adanya asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) timbul karena setiap pihak selalu berusaha untuk mencapai atau

mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Hal inilah yang dapat mendorong adanya praktik *earning manajemen* dalam suatu perusahaan.

Secara syariah tidak diperkenankan adanya praktik manajemen laba. Hal ini sesuai dengan surat Al Baqoroh ayat 282:

“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS Al Baqoroh ayat 282).

Walaupun sudah di atur dalam Al-Qur’an terkait dengan adanya larangan manipulasi dalam bermuamalah, keputusan Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam fatwa No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan) sebaiknya digunakan sistem akrual basis, meskipun juga disebutkan bahwa dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*). Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering digunakan untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau akrual diskresioner). Konsep akrual ini memungkinkan dilakukannya rekayasa laba atau *earning management* oleh manajer untuk menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi (Masodah, 2007).

Penelitian Syahfandi (2012) tentang perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia memberikan bukti bahwa bank syariah melakukan praktik manajemen laba dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Bank

syariah melakukan praktik manajemen laba dengan mengurangi tingkat perubahan laba bersih dalam periode pelaporannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Bank syariah melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan polaperataan laba (*income smoothing*)

2. Jumlah Pembiayaan dan Risiko Kredit terhadap Perataan Laba

Pada awalnya semua kredit adalah kredit lancar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu semua itu dapat berubah, bisa jadi kredit tersebut akan macet di tengah waktu. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu akun yang berfungsi untuk mengantisipasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah suatu akun untuk menutup kemungkinan risiko yang terjadi karena tidak tertagihnya fasilitas kredit atau bentuk investasi aktiva produktif lain. PPAP merupakan salah satu akun dalam perbankan yang memiliki kecenderungan manipulasi yang cukup besar. Semakin besar PPAP berarti semakin besar estimasi terhadap timbulnya kredit yang bermasalah.

Total kredit (*total financing/ TF*) adalah jumlah pembiayaan syariah yang merupakan proxy untuk profil jumlah pembiayaan bank. Total pembiayaan (TF) dapat menunjukkan adanya implementasi *dynamic provisioning* yang dilakukan oleh bank syariah. Total pembiayaan diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba.

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Iqbal dan Abbas, 2007). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah risiko pengembalian kredit oleh debitur.

Secara konsep teori NPF merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (Iqbal dan Abbas, 2007). NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, begitu sebaliknya semakin tinggi NPF maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank. Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. PPAP sangat rentan untuk dijadikan praktik perataan laba. Tingginya beban PPAP dapat menyebabkan turunnya laba perusahaan. Begitu sebaliknya, beban PPAP yang rendah dapat menaikkan laba perusahaan. Inilah yang digunakan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba (Mawardi, 2005). Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh NPF dan TF dilakukan oleh Boulila, *et al.*, (2010), Pe'rez, *et al.*, dalam Syahfandi (2012), dan Syahfandi

(2012) yang menguji pengaruh NPF terhadap perataan laba dengan PPAP sebagai proksi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF dan TF berpengaruh signifikan dan positif terhadap perataan laba bank syariah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah pembiayaan berpengaruh positif terhadap perataan laba

H3: Risiko pembiayaan berpengaruh positif terhadap perataan laba

3. Profitabilitas terhadap Perataan Laba

EBTP (*Earning Before Taxes and Provisions*) merupakan variabel laba operasi bersih sebelum pajak dan cadangan bank *i* pada periode *t*. EBTP menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBTP digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank syariah untuk melakukan perataan laba dengan mekanisme PPAP.

Menurut Tobing dan Nur (2009), jika bank memiliki kinerja yang bagus di tahun ini dan memprediksi kinerja yang tidak baik di waktu yang akan datang (*good-poor*), maka manajer bank akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP. sedangkan jika bank memiliki kinerja yang tidak baik di tahun ini dan memprediksi kinerja yang baik di waktu yang akan datang (*poor-good*), maka bank akan meningkatkan laba tahun ini dengan cara meminjam laba masa depan melalui penurunan beban PPAP. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah

satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan praktik perataan laba. Variabel ini biasanya digunakan dalam literatur sebelumnya sebagai proksi untuk praktik manajemen laba (Boulila, *et al.*, 2010). Hasil penelitian sebelumnya oleh Pe'rez, *et al.*, dalam Syahfandi (2012) dan Syahfandi (2012) menunjukkan variabel ini berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap perataan laba

4. Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama Moses dalam Muliati (2011) dan Halim, dkk., (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Moses dalam Muliati (2011) mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba (salah satu bentuk

manajemen laba) dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Senada dengan hal tersebut ukuran perusahaan yang dijadikan variabel kontrol dalam penelitian Syahfandi (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki korelasi positif terhadap perataan laba.

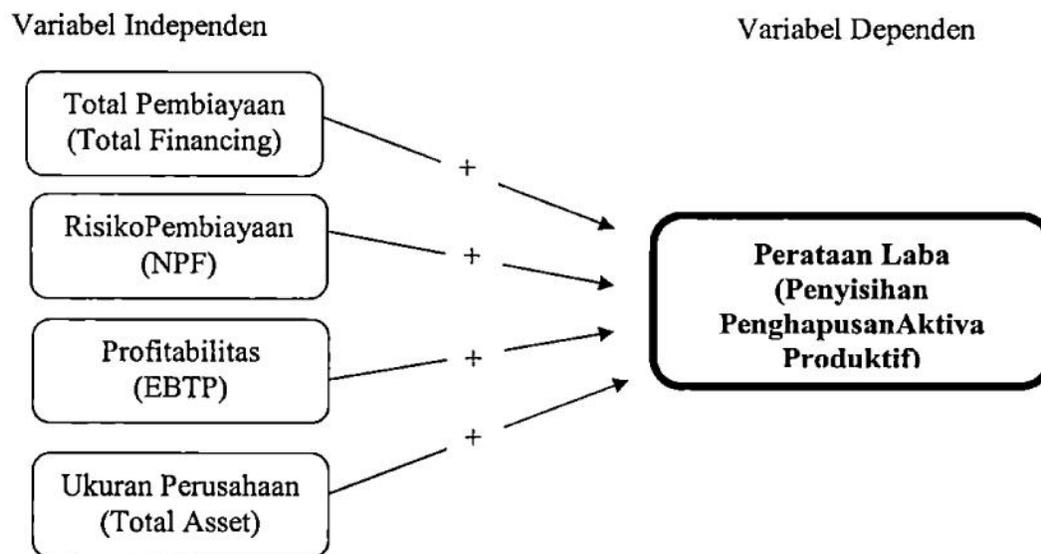
Pandangan kedua Marrakchi dalam Muliati (2011), Muliati (2011), dan Siddharta (2005) menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Marrakchi dalam Muliati (2011) di Amerika Serikat dengan menggunakan data sampel perusahaan industri tahun 1996 menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis investor yang lebih besar, sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang kredibel.

Penelitian Siddharta (2005) menemukan ukuran perusahaan berhubungan negatif signifikan dengan manajemen laba. Namun ada kekurangan dalam penelitian ini, yaitu periode yang dinilai terlalu pendek 1995-1996 dan 1999-2002.

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba

D. Model Penelitian

Untuk membantu dalam memahami penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian